

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsep Pemberdayaan

Secara etimologis, Pemberdayaan atau empowerment berasal dari kata power atau daya yang berarti kekuatan atau kapasitas. Dengan cara ini, pemberdayaan adalah suatu kerja atau siklus untuk memperoleh kekuatan, daya atau kapasitas itu dari orang-orang yang memiliki kapasitas kepada individu-individu yang tidak memilikinya. Menurut Edi Suharto (35:2003) Pemberdayaan adalah suatu cara di mana seorang individu, rakyat, organisasi dan komunikasi dikoordinasikan untuk memiliki pilihan untuk mengendalikan (memerintah) hidup mereka. Pemberdayaan adalah siklus dimana yang lemah dapat menghadapi atau mengontrol keadaan atau kondisi dalam hidupnya. Kontrol ini menggabungkan perintah atas sumber yang berbeda (yaitu fisik dan intelektual) dan menggabungkan filosofi (keyakinan, nilai, dan pemikiran). Pemberdayaan juga berarti memperluas kesadaran individu sehingga mereka mendapatkan kebutuhan akan harta sehingga dengan penguatan ini dipercaya daerah setempat akan berubah dari "korban" kemajuan menjadi "pelaku" pembangunan. Pada tahap ini, akan ada proses-proses yang harus dilalui oleh daerah ini, khususnya kaum perempuan, dalam memampukan agar otonomi di mata masyarakat dapat dipahami. Sehingga masalah sosial di lingkungan sekitar, seperti masalah keuangan, pendidikan, bisa ditanggulangi dengan sumber daya yang ada.

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah sebuah usaha untuk mendistribusikan kekuasaan masyarakat desa di berbagai bidang kehidupan, seperti kebebasan dasar, kebebasan politik, aspek keuangan, sosial, sosial hingga agama. Memberdayakan masyarakat desa memberikan bagian yang ideal kepada masyarakat, sehingga mereka bisa menjadi orang yang bebas atau berdaya yang dapat membuat pilihan-pilihan yang berhubungan dengan kehidupan mereka masing-masing.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Paul Freire dalam Rifky Yudistira (2023), pemberdayaan bergantung pada pendekatan yang disebut conscientization, yang merupakan proses pembelajaran untuk melihat inkonsistensi sosial, ekonomi, dan politik di mata publik. Pandangan dunia ini mendesak individu untuk mencari cara menciptakan kemandirian dari struktur-struktur yang menindas. Berawal dari kesepakatan ini, maka partisipasi masyarakat daerah tidak hanya terbatas pada pelaksanaan suatu program, tetapi juga membahas nilai-nilai politik juga.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk ekosistem masyarakat menjadi lebih mandiri, diantaranya kebebasan untuk berpikir, bertindak, dan mengontrol apa yang akan dilaksanakan. Kemandirian berfikir memiliki arti penting dimana suatu kondisi yang dialami masyarakat setempat ditandai dengan kemampuan memikirkan, mengambil keputusan, dan melaksanakan haknya secara utuh untuk terlibat menangani persoalan-persoalan sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi itu bisa disebut telah mengalami kemajuan secara sosial kultur. Oleh karena itu, penting untuk mengarahkan kemampuan SDM secara maksimal dengan kondisi kognitif, konatif,

psikomotorik dan afektif. Keempat keadaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kapasitas kognitif adalah kemampuan berpikir berdasarkan informasi dan pemahaman individu atau kelompok untuk mengamati jawaban atas masalah yang dihadapi.
2. Kondisi konatif adalah perilaku masyarakat yang terwujud yang ditujukan pada perilaku yang sensitif terhadap kualitas nilai kemajuan dan keberdayaan.
3. Kondisi afektif adalah perasaan atau sense yang diklaim oleh masyarakat sebagai sesuatu yang dianggap wajar untuk diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam perilaku dan cara pandang.
4. Terakhir, kapasitas psikomotorik adalah kemampuan yang digerakkan oleh masyarakat sebagai usaha mereka untuk membantu peningkatan aktivitas pembangunan

Dari keempat keadaan di atas, apabila semuanya dilakukan dengan seharusnya, maka akan tercipta suatu masyarakat mandiri secara ekonomi yang mampu mengurus persoalan-persoalan sosial yang ada di mata masyarakat, Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan untuk membantu dan mempercepat tercapainya keseimbangan dan kesetaraan sesama manusia.

Menurut Schumacher dalam Rifky Yudistira (2023) berpandangan bahwa rakyat miskin adalah bagian dari pemberdayaan dengan tidak menghilangkan ketimpangan struktural yang ada, mereka juga memiliki kekuatan untuk berkembang. Ada tiga pilar penting dalam pelaksanaan pemberdayaan, dan tiga

pilar tersebut adalah Pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut harus saling terikat serta berkesinambungan agar jalannya pemberdayaan dalam masyarakat akan terwujud dan pembangunan akan berjalan ke arah yang lebih baik (seharusnya) seperti yang diharapkan.

Pertama Pemerintah merupakan komponen pembuat kebijakan politik, dimana secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap tatanan hidup masyarakat luas. Maka peran ini memang hanya bisa diisi oleh lembaga-lembaga yang mewadahi aspirasi-aspirasi untuk tujuan membangun masyarakat. Kita tahu di Indonesia ada banyak lembaga pemerintah yang mengurus pemberdayaan masyarakat desa. Melalui lembaga ini, pemerintah bisa mengulurkan tangan untuk bersama-sama dengan swasta dan masyarakat melakukan pembangunan SDA dan SDM yang mumpuni.

Kedua adalah *swasta*, dimana peran ini adalah bisa disebut sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, swasta ini bisa berbentuk individu, bisa kelompok maupun juga organisasi. Swasta mempunyai peran untuk mengedukasi masyarakat secara langsung, karena apabila semuanya dilakukan oleh pemerintah, maka proses ini tidak akan berjalan efektif. Maka peran swasta inilah yang menjadi katalis atau percepatan proses menuju masyarakat yang berdaya. Dalam hal ini UKM KARATE UNSIL sebagai swasta sekaligus mitra mempunyai peran demikian, Ukm Karate yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembangunan, yang memang dikhususkan untuk masyarakat desa Linggajati, yang selama ini kita lihat kurang dilibatkan. Dalam hal inilah swasta (UKM Karate) menjadi jembatan penghubung

dan mempunyai peran yang cukup penting untuk melibatkan Masyarakat Desa dalam melakukan pembangunan SDA maupun SDM.

Ketiga tentu saja masyarakat, komponen yang tidak bisa dipisahkan dari dua komponen sebelumnya, masyarakat yang sadar akan pentingnya pembangunan SDA dan SDM tentu akan bergerak secara sadar untuk melakukan sebuah perubahan, khususnya dimasyarakat sekitarnya. Masyarakat harus dilibatkan dalam melakukan proses pembangunan yang dilakukan pemerintah, apabila mereka ingin pembangunan itu berjalan efektif. Masyarakat terutama perempuan harus menjadi pelaku perubahan, bukan menjadi objek dan menjadi korban dalam pembangunan.

a. Konsep Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan masyarakat mempunyai jangkauan yang umum dan luas, terdapat banyak macam pemberdayaan yang bisa dilakukan kepada sasarannya dalam hal ini masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat dikaitkan dengan pembangunan politik disuatu daerah, karena keduanya saling berkaitan, karena secara umum, pemberdayaan masyarakat mengacu kepada terbentuknya kesejahteraan ekonomi dalam suatu ekosistem sosial, yang nantinya akan menunjang kesadaran dalam individu sehingga terjadinya pembangunan politik dengan sendirinya, maka dari itu, pemberdayaan politik juga merupakan upaya memberdayakan masyarakat.

Menurut Kartono (2009), Pendidikan Politik bisa disebut juga political forming atau bildung. Forming merupakan intensi untuk membentuk insan politik

yang menyadari status/kedudukan politiknya ditengah masyarakat. Sedangkan Bildung adalah membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggungjawab sendiri untuk menjadi insan politik. Tujuannya agar setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang sedang diterapkan. Pembangunan politik tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran penting para pelaku kebijakan publik dalam hal ini pemerintah khususnya di Indonesia, untuk menunjang pemberdayaan masyarakat, supaya dengan adanya peran ini bisa menjadi percepatan terjadinya perubahan sosial kearah lebih baik. Indonesia sendiri tentu masih sedang berproses dalam sistem kenegaraanya dan sistem sosialnya. Reformasi politik tahun 1998 menjadi bukti bahwa Indonesia sedang mengalami pendewasaan demokrasi, diikuti kejadian-kejadian setalahnya.

Pemberdayaan masyarakat telah berkembang diberbagai literatur dan pemikiran para elite, walaupun memang dalam kenyataanya belum maksimal secara implementasinya. Pemberdayaan masyarakat berkaitan erat dengan pembangunan masyarakat, dimana pembangunan masyarakat akan tentu saja membutuhkan sustainable development yang tentunya akan didapat apabila pemberdayaan masyarakat dilakukan atau masyarakat sudah berdaya. Pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan yang berakar kerakyatan adalah sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih mengalami keterbelakangan sosial, ekonomi, politik dll.

Pada intinya, konsep pemberdayaan politik ini merupakan sebuah penggabungan konsep pemberdayaan, dimana gagasan utama pemberdayaan adalah masalah ekonomi yang terjadi dimasyarakat yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat itu sendiri dan berujung terhadap pembangunan masyarakat madani, namun itu semua tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, supaya pelaksanaan seluruh pemberdayaan ini bisa ditunjang dengan kebijakan kebijakan politik. Masyarakat diberdayakan secara politik, melalui pendidikan pendidikan politik, diskusi publik, literatur politik, sehingga garis finish atau output yang dihasilkan adalah terbentuknya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi dan tentu saja secara politik.

2.1.2 Ekonomi Politik

Pada dasarnya penelitian ini menggunakan Ekonomi politik sebagai alat analisis untuk mengupas fenomena yang terjadi berdasarkan rumusan masalah yang diangkat. Konsep ekonomi politik ini mengacu kepada masyarakat pembuat ecoprint sebagai pelaku ekonomi dan pemerintah desa Linggajati sebagai pemangku kebijakan yang mana keduanya saling berkaitan. Hal ini selaras dengan konsep ekonomi politik yang diangkat oleh Mochtar Mas'oeed dalam Herawaty (2021) ekonomi politik merupakan studi yang mengaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Tidak hanyaitu Caporaso & Levine dalam Deliarnov (2006), menurutnya ekonomi

politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara negara.

Dalam hal ini ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Selain itu ekonomi politik juga merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan, dimana dalam perkembangan perkembangannya, ekonomi politik merupakan studi interdisipliner yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, atau sistem yang saling memengaruhi (Helyani : 2021)

Pendekatan yang digunakan dalam ekonomi politik yakni mengenai implikasi yang ditimbulkan dari bidang ekonomi dan berkaitan erat dengan implikasi bidang politik, dengan demikian pendekatan seperti ini tidak menunjukkan sebuah teori tertentu , meskipun pada perkembangannya perpaduan antara ilmu ekonomi dan politik memunculkan pemahaman dan keyakinan yang berbeda beda untuk secara tegas meneliti hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik.

Ada beberapa pandangan yang menganggap bahwa ekonomi politik bukanlah sebuah teori, melainkan pendekatan pendekatan dari bidang ekonomi dan bidang politik yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, politik , sosial maupun pandangan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Didasarkan pada fenomena tersebut yang tidak bisa dipisahkan. Dalam hal ini Mas'ood dalam (Ali : 2005) mencoba mendasari pada asumsi bahwa ekonomi (yang menyangkut fenomena kekayaan) dan politik (dengan fenomena kekuasaan) yang diikat dalam hubungan saling mempengaruhi. Hubungan antara politik dan ekonomi diartikan kedalam isu tentang hubungan kekuasaan dan kekayaan. Dalam hal ini kajian politik umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke arah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Dengan demikian penerapan kekuasaan dengan segala faktornya sebagai penentu sifat suatu sistem ekonomi.

Secara mendalam untuk memenuhi tercapainya serta redistribusi kekayaan dan kekuasaan, Mas'ood dalam (Ali : 2005) menjelaskan analisa baku dalam ekonomi politik mengharuskan untuk mempertimbangkan ketiga variabel yaitu *nilai (value), kepentingan (interest), dan kekuasaan (power)*. **Pertama**, menggunakan variabel nilai, apakah proses yang dilakukan berdasarkan nilai mengutamakan “persaingan” ? (menekankan mekanisme pasar yang efisien, memberi ganjaran pada yang produktif dan menganggap ketimpangan sebagai keadaan yang tak terelakan) atau nilai dengan sikap “kerjasama” (berarti menekankan pemerataan kesejahteraan dan pemberian wewenang ketingkat paling bawah). **Kedua**, adanya variabel kepentingan, yakni siapa yang diuntungkan dalam proses itu ? dan siapa yang dirugikan ?. Terakhir, variabel kekuasaan , dalam analisis ekonomi politik harus memperhitungkan hal tersebut, artinya siapa yang berkuasa?. Apa sumber-sumber kekuasaanya ? nilai dan kepentingan apa yang didukung oleh penerapan dari kekuasaan itu ?.

Dengan demikian ketiga variabel tersebut bisa menjadi acuan baku untuk menganalisis hubungan antara ekonomi dan politik, seperti halnya dalam kasus yang diangkat antara pemerintah desa Linggajati dan Komunitas pengrajin Ecoprint di Desa Linggajati Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

2.1.3 Relasi Negara dan Masyarakat

Relasi atau hubungan sosial merupakan sebuah timbal balik antara individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain dalam suatu masyarakat dimana satu sama lain saling memengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong satu sama lain (Putra, 2002).

Konsep relasi itu sendiri sama halnya seperti hubungan Relasi Negara dan Masyarakat. Negara merupakan sebuah kelompok dalam sebuah tatanan masyarakat yang melakukan interaksi dengan Masyarakat, misalnya dalam penelitian ini hubungan negara yaitu pemerintah desa dan masyarakat yaitu pengrajin ecoprint desa Linggajati dalam hal ini saling membutuhkan satu lain untuk mencapai sebuah keinginan bersama. Pengrajin ecoprint membutuhkan pemerintah sebagai fasilitator di sektor Industri kreatif mereka seperti pada pemberian Tempat untuk pemberdayaan, menunjang kegiatan produksi, penyediaan Modal , Alat produksi dan media pemasaran dalam pengelolaan penjualan produk ecoprint untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Dan Negara membutuhkan pengrajin ecoprint sebagai pelaku ekonomi dalam pengelolaan sektor industri kreatif sebagai penggerak perekonomian agar bisa

meningkatkan pendapatan negara sebagai tolak ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat pengangguran di dalam struktur masyarakat.

Peran Negara dalam relasi ini yaitu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para pengrajin ecoprint dalam pengelolaan produksi ecoprint maupun membantu memasarkan produk ecoprint khas linggajati. Menurut Harold J. Laski (Budiardjo, 2008) mengatakan bahwa Negara harus bisa menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Yang berarti Negara harus ikut campur dalam peningkatan industri kreatif pengrajin ecoprint untuk mencapai sebuah kesejahteraan mereka. Negara yang dimaksud pada pembahasan ini adalah sosok pemerintah desa sebagai pengatur dan yang menetapkan sebuah kebijakan. Dalam hal yang diperlukan oleh pengrajin ecoprint yaitu pemerintah dalam menunjang kebutuhan mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti pemberian modal, pemberdayaan masyarakat, penyediaan alat produksi, dan pemasaran penjualan produk yang dihasilkan.

Adam Smith (Caporaso dan levine, 2015) menekankan bahwa Negara Negara tidak hanya menjaga ketertiban dalam negara dan memberikan keamanan dari serbuan negara asing, namun negara juga harus memberikan pelayanan publik dalam pembangunan-pembangunan infrastruktur publik yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta. Menurut pemikiran keynesian stabilisasi ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara menggunakan ekonomi sirkular untuk mengontrol kestabilan ekonomi.

2.1.4 Konsep Dasar pemerintahan Desa

Didalam PP No 72/2005 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹ Secara tidak langsung dalam peraturan pemerintah tersebut mengakui adanya otonomi desa dalam bingkai NKRI.

Sedangkan Pemerintahan desa dalam UU Nomor 32 tahun 2004 yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU Nomor 32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”²

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa,

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

² Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa.

melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian kepala desa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan, kewenangan tersebut sebagai berikut:

Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Dengan demikian wewenang kepala desa yang tercantum didalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 relevan dengan tujuan penelitian ini bahwa pemerintah desa memiliki peran besar mengatur upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi lokal, jejaring mitra, dan

³ UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26

pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, penggunaan teknologi daya guna serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan melibatkan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes sebagai penguatan kelembagaan .

a) Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan satu strategi untuk melaksanakan pembangunan yang berdasarkan azas kerakyatan. Dimana segala upaya diarahkan untuk memenuhi keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, pemberdayaan diaktualisasikan melalui partaisipasi masyarakat dengan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga tertentu untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada kelompok masyarakat yang terorganisir (Safyuddin, 2017).

Menurut Edi Suharto (2014) Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkain kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial.

Menurut Munawar (2011) dalam jurnal civis mengutip (Chamber, 1995) Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory, empowerment and sustainable. Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.

Kelompok miskin di suatu pedesaan, tidak akan mampu melakukan proses pemberdayaan sendiri tanpa bantuan atau difasilitasi pihak lain. Harus ada kelompok atau seseorang, suatu lembaga yang bertindak sebagai agen pemberdayaan bagi mereka (Syafe'i, 2006). Faktor keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat adalah dengan adanya kerja dari berbagai upaya mulai dari *Pemerintah Desa, Peningkatan pengetahuan dan keberlanjutan* diantaranya adalah ⁴ :

- (1) Pemerintah berperan dalam menciptakan gambaran program, mencari sumber dana, penglokasian dana, menjadi penghubung dengan pihak swasta atau Lembaga swadaya Masyarakat.
- (2) Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan warga, serta diperolehnya pendapatan hasil usaha penjualan produk.
- (3) Keberlanjutan program pemberdayaan ditunjukkan dengan telah adanya pengembangan produk atau variasi produk, dan terbentuknya kemandirian tim..

Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan masyarakat yang positif dan berkelanjutan. Merupakan usaha bersama yang di ikuti oleh pihak pemberdaya dan masyarakat untuk memenuhi aspek dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami sebagai proses penyadaran dan penemuan potensi masyarakat lokal untuk memecahkan masalah sehari-hari mereka.

⁴ dari Saugi, Wildan dan Sumarno Sumarno. (2015) Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2.(2), 226.

Memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kapasitas yang dibutuhkan harus mampu untuk mengubah kualitas individu atau kelompok menjadi lebih baik lagi.

Dengan diadakannya pemberdayaan dengan pelatihan pembuatan ecoprint, masyarakat desa Linggajati diberikan pembelajaran pembuatan ecoprint dengan pemberian materi dan praktek pembuatan ecoprint dengan didatangkannya tenaga ahli yang sudah berkecimpung dalam pembuatan ecoprint, serta diharapkan menghasilkan kualitas masyarakat yang kompeten dan memiliki nilai dalam pengembangan ekonomi kreatif di desa linggajati.

Kegiatan pemberdayaan dengan pembuatan ecoprint kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Linggajati, kecamatan Sukaratu Kabupaten tasikmalaya, menyajikan pentingnya penguatan kelembagaan yang dimiliki oleh desa untuk pemberdayaan masyarakat berkelanjutan, salah satu lembaga yang relevan dalam penguatan ini adalah keterlibatan lembaga BUMDesa sebagai lembaga ekonomi masyarakat desa yang membantu dalam menunjang perekonomian masyarakat khususnya dalam peningkatan ekonomi di sektor industri kreatif yaitu ecoprint desa Linggajati , di samping program pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan ecoprint, lembaga ekonomi masyarakat desa harus menjadi wadah sarana pengembangan hasil dari pemberdayaan, pemerintah melalui kebijakan desa harus mampu menjalankan proses interaksi yang sangat strategis dalam mendukung capaian kegiatan pemberdayaan ini yaitu munculnya kepedulian dan perhatian untuk melakukan langkah-langkah terhadap keberlanjutan dari hasil pemberdayaan masyarakat, khususnya membantu dalam memfasilitasi penjualan

produk masyarakat yang sudah diberdayakan, penguatan kelembagaan telah menjadi dasar bagi masyarakat di Desa Linggajati untuk lebih peduli pada keberlanjutan usaha dan mendapatkan hasil pada penguatan ekonomi melalui pembuatan ecoprint.

b) Pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes

Pada Prinsipnya Pemerintah desa Linggajati melalui BUMDes masyarakat desa Linggajati adalah untuk merealisasikan tujuan pendirian BUMDesa itu sendiri dalam gerakan peningkatan ekonomi masyarakat dan penguatan kelembagaan ekonomi desa. Maka ada beberapa strategi pengembangan ekonomi masyarakat melalui BUMDes diantaranya :

- 1) Meningkatkan pelatihan dan magang bagi pengelola untuk mengoptimalkan fungsi kegiatan usaha.
- 2) Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan.
- 3) Penyediaan pusat pemasaran dan informasi terpadu mengenai produk BUMDes.
- 4) Melakukan pendampingan kegiatan ekonomi masyarakat.⁵

Strategi ini diharapkan menjadi acuan bagi BUMDes Linggajati untuk membantu pengembangan ekonomi dengan pembuatan batik ecoprint. Dengan diadakannya pelatihan yang berkelanjutan, sumber daya manusia dalam mengelola

⁵ Siska, Herry Azhar, (2019) Pemberdayaan Dan Percepatan Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *jurnal Kebijakan Pembangunan* 14 (2), 133–46.

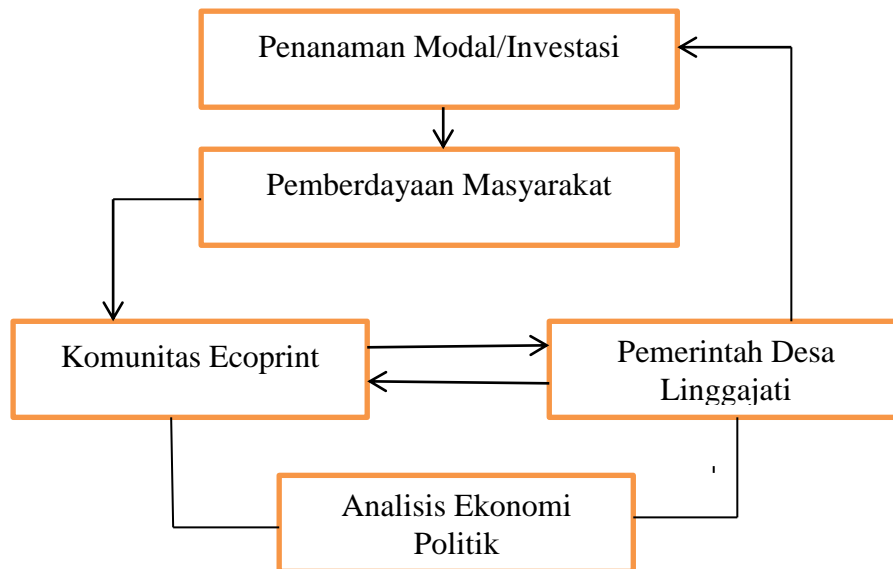
pembuatan batik ecoprint bisa meningkat dan bisa bersaing dengan produk produk unggul dunia.

Ada beberapa tujuan didirikan Badan Usaha Milik Desa diantaranya, 1) Mendorong perkembangan perekonomian desa 2) Meningkatkan pendapatan asli desa 3) Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah 4) Mendorong berkembang usaha mikro sektor informal BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Artinya usaha yang kelak akan diwujudkan adalah digali dari keinginan dan hasrat untuk menciptakan sebuah kemajuan di dalam masyarakat desa.⁶

Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah desa sangat penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat maupun penguatan lembaga ekonomi desa dan pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi lokal serta mendayagunakan masyarakat sehingga mencapai taraf hidup yang lebih baik lagi, tentunya hal ini harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh konsensus bersama dan berdasarkan kebijakan pemerintah melalui undang-undang.

⁶ Hasan, Amir dan Gusnardi.(2018) *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*. Pekanbaru: Taman Karya.

2.2 Kerangka Berpikir



Kerangka pikir diatas berakar dari rumusan masalah penelitian yang dikembangkan sesuai dengan teori-teori yang sudah dibangun. Kerangka pemikiran ini merupakan pijakan untuk menganalisis lebih dalam data dan juga fenomena yang ada pada saat penelitian serta dijadikan juga batasan penelitian agar penelitian yang berlangsung tidak keluar dari tujuan penelitian yang telah ditentukan. Dari kerangka pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai upaya Pemerintah Desa Linggajati dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan pembuatan Ecoprint di Lingkungan Desa Linggajati kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya jika dilihat dari kajian Ekonomi Politik . Hal yang melatar belakangi peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk menelaah lebih dalam hubungan pemerintah desa Linggajati dengan komunitas Ecoprint mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Linggajati

dalam pemberdayaan masyarakat serta menganalisis secara ekonomi politik terhadap hubungan komunitas ecoprint dengan pemerintah desa terhadap pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan bersama-sama. Mandegnya aktifitas produksi dari komunitas ecoprint menjadi pertanyaan ketidak sustainablenya program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa linggajati. Komunitas pengrajin ecoprint yang merupakan hasil dari pemberdayaan pemerintah desa yang mana jika pemerintah desa fokus dalam pengembangan ekonomi industri kreatif pembuatan ecoprint ini bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat desa Linggajati akan tetapi bisa menjadi industri kreatif yang besar dibidang ecoprint di kecamatan sukaratu kabupaten tasikmalaya bahkan bisa saja berdampak terhadap pendapatan desa yang meningkat. Maka dari itu peneliti mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana upaya Pemerintah Desa Linggajati dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui pelatihan pembuatan Ecoprint di Lingkungan Desa Linggajati kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya jika dilihat dari kajian Ekonomi Politik, karena hal ini menjadi sebuah permasalahan yang harus dikaji dan diteliti, apalagi mengenai peran Pemerintah Desa sebagai aparatur Negara yang bertugas dalam mensejahterakan masyarakat dan menjadi kunci dalam kemajuan pembangunan sebuah desa dan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

Dalam penelitian ini konsep pemberdayaan dan analisi ekonomi politik yang dikemukakan oleh Muhtar Mas'ood dengan menganalisis tiga variabel utama yaitu *nila (value)*, *kepentingan (interest)*, dan *kekuasaan (power)* menjadi landasan peneliti untuk mengkaji dan meneliti permasalahan yang terjadi di Desa Linggajati terlebih mengenai hubungan antara komunitas ecoprint dan pemerintah Desa Linggajati.

Oleh sebab itu perlu ada penelitian sebagai upaya untuk menganalisis permasalahan yang ada, agar nantinya bisa menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemerintah, masyarakat maupun pihak yang memiliki hasrat untuk membangun negeri. Dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi lebih untuk pengembangan masyarakat di Desa Linggajati dalam sektor industri kreatif melalui bisnis dan pembuatan produk Ecoprint khas Linggajati.